

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga, pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang (Todaro,2011).

Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut :

1. Pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah
2. Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja
3. Pemilik modal akan menerima bunga modal
4. Pengusaha akan menerima laba usaha

Melalui proses produksi yang ada pada masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi.

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penyebab utama kemiskinan suatu rumah tangga adalah rendahnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan karakteristik penduduk miskin tersebut antara lain adalah memiliki rata-rata jumlah tanggungan yang banyak. Jumlah anggota dalam rumah tangga adalah indikasi yang dominan dalam menentukan miskin atau tidak miskinnya rumah tangga. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah yang terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang

penting untuk diamati, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam praktiknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan tersebut kearah pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif disetiap daerah untuk dikembangkan.

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah merupakan suatu proses dimana bagian pemerintahan daerah juga masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan dapat membentuk suatu pola kerjasama antar pemerintahan daerah tersebut dengan sektor swasta dengan tujuan menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah (Alfiatus,2018).

Namun, untuk kemajuan suatu negara, pembangunan bukan merupakan suatu tujuan negara dalam menyelesaikan permasalahan negara. Pembangunan ini hanya alat sebagai proses untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara dan mengurangi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan dari satu daerah dengan daerah yang lain merupakan inti dari suatu pembangunan. Dengan berhasilnya suatu pembangunan negara akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi negara, yang mana dari hasil-hasil tersebut harus dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sehingga dengan adanya hal ini, permasalahan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan terjadi lagi. Jika pembangunan dan pertumbuhan negara berhasil meningkat, maka seluruh masyarakat pun akan merasakan dampaknya melalui naiknya tingkat

pendapatan masyarakat. Jika dalam suatu daerah terdapat pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi, dapat diindikasikan bahwa dari pertumbuhan ekonomi hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan tersebut (Ferdinand,2017).

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing individu/kelompok/daerah yang berbeda serta pembangunan yang cenderung terpusat hanya pada daerah-daerah yang maju.

Ketimpangan distribusi pendapatan salah satunya juga dapat dipengaruhi oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto juga semakin tinggi (Sofia,2018).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Kabupaten/Kota (NTT) 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumba Barat	1.988.825,40	2.168.939,69	2.334.270,55	2.351.536,21	2.416.855,13
2	Sumba Timur	5.370.176,55	5.816.332,94	6.256.177,54	6.257.494,23	6.405.710,48
3	Kabupaten Kupang	6.530.311,30	7.140.157,68	7.602.122,20	7.649.032,79	7.984.705,90
4	TTS	6.727.603,93	7.369.199,07	7.919.627,89	7.942.731,08	8.243.662,17
5	TTU	3.532.401,90	3.825.631,29	4.088.904,66	4.085.185,47	4.222.693,09
6	Belu	3.784.671,22	4.147.192,39	4.482.254,45	4.551.768,09	4.700.075,35
7	Alor	2.594.740,35	2.831.309,80	3.055.042,20	3.052.804,74	3.169.927,37
8	Lembata	1.586.163,06	1.724.744,75	1.856.806,64	1.853.919,18	1.914.034,98
9	Flores Timur	4.511.123,61	4.900.913,87	5.246.068,64	5.269.528,86	5.381.281,77
10	Sikka	4.326.749,11	4.732.351,03	5.121.992,55	5.114.229,61	5.310.380,62
11	Ende	5.266.647,40	5.689.963,48	6.105.192,79	6.075.210,35	6.314.745,70
12	Ngada	3.014.618,68	3.233.025,30	3.473.019,37	3.493.611,56	3.576.500,83
13	Manggarai	3.964.645,60	4.332.594,72	4.677.114,28	4.651.357,55	4.757.389,54
14	Rote Ndao	2.635.282,43	2.883.900,16	3.133.983,68	3.169.734,41	3.274.710,70
15	Manggarai Barat	2.896.539,40	3.187.960,31	3.466.379,69	3.519.340,01	3.611.199,39
16	Sumba Tengah	999.011,85	1.093.556,51	1.176.634,28	1.195.858,81	1.230.399,74
17	Sumba Barat Daya	3.198.892,30	3.478.338,00	3.754.697,90	3.769.102,22	3.887.098,60
18	Nagekeo	1.928.589,99	2.102.044,11	2.241.365,60	2.274.350,13	2.346.535,11
19	Manggarai Timur	2.720.529,18	2.969.624,88	3.212.949,34	3.288.889,87	3.412.914,20
20	Sabu Raijua	1.190.444,51	1.306.609,03	1.416.734,04	1.414.249,01	1.448.890,09
21	Malaka	2.357.373,35	2.567.429,42	2.780.150,45	2.833.048,15	2.929.914,19
22	Kota Kupang	20.571.174,23	22.498.164,62	24.410.950,69	23.912.780,35	24.334.492,15

Sumber : BPS Kota Kupang 2022

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB Nusa Tenggara Timur meningkat tiap tahunnya yang mana terjadi peningkatan dengan arti membaik. Semakin membaik PDRB maka perekonomian juga meningkat yang mana kesejahteraan juga meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat PDRB daerah maka semakin sejahtera penduduknya sehingga pendapatan tinggi dan merata antar daerah akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut Nurlina (2017) suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dapat diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga

konstan (at constant price inflation factor) sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Ahli ekonomi Kuznets dan Kaldor yang menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mencapai suatu peningkatan perekonomiannya. Semakin tinggi ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu negara, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik ialah menjaga agar distribusi pendapatan setimpang mungkin (Kuznets,1995).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Masyarakat Kabupaten/Kota di Provisi Nusa Tenggara Timur (NTT)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang dipaparkan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan masing-masing wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang pengetahuan yang berhubungan dengan analisis distribusi pendapatan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu untuk saya sendiri dan dapat memperkaya wawasan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara Praktis

Bagi Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampilan

3. Secara Akademis

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.